



## **STRATEGI MEMBANGUN KEMITRAAN MULTIPHIK UNTUK MEMPERKUAT SISTEM KESEHATAN: STUDI LITERATUR**

**Mutia Devani Rahmadanti<sup>1</sup>, Shofiyah Salma Purba<sup>2</sup>, Riswandy Wasir<sup>3</sup>, Novita Dwi Istanti<sup>4</sup>**

<sup>1-4</sup>Fakultas Ilmu kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : [2110713094@mahasiswa.upnj.ac.id](mailto:2110713094@mahasiswa.upnj.ac.id)

**Abstrak :** Kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang penting untuk dilakukan pembangunan kesehatan sebagai tanggungjawab bersama bagi keseluruhan sektor. Namun data peranan kemitraan multipihak kesehatan di Indonesia masih sulit ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi dan strategi untuk membangun kemitraan kesehatan di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review. Sumber data literature diperoleh melalui Google Scholar dan PubMed, Data penelitian diambil dari tahun 2020-2024. Hasil: Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah didapat bahwa kondisi kemitraan telah melibatkan beberapa sektor terutama partisipasi masyarakat. Kemitraan sinergis menggabungkan sumber daya keuangan dan non-keuangan dari berbagai pihak untuk hasil terbaik. Kemitraan multipihak yang efektif melibatkan penerapan perubahan sistemik, transformasi institusi, pemberdayaan kelompok pemangku kepentingan, penanganan konflik secara konstruktif, komunikasi efektif, kolaborasi kepemimpinan, dan pembelajaran partisipatif. Simpulan: Kondisi kemitraan melibatkan sektor yang beragam, terutama partisipasi masyarakat, dalam upaya memadukan sumber daya untuk hasil optimal. Kemitraan multipihak yang efektif memperhatikan perubahan sistemik, transformasi institusi, pemberdayaan pemangku kepentingan, penanganan konflik, komunikasi, kolaborasi kepemimpinan, dan pembelajaran partisipatif.

**Kata Kunci :** Jalinan Kemitraan, Kemitraan Multipihak, Strategi Sistem Kesehatan

**Abstract :** Partnerships are an important form of cooperation for health development as a shared responsibility for all sectors. However, data on the role of multi-stakeholder health partnerships in Indonesia is still difficult to find. The purpose of this study was to determine the conditions and strategies for building health partnerships in Indonesia. Methods: This study used the literature review method. Literature data sources were obtained through Google Scholar and PubMed, research data were taken from 2020-2024. Results: Based on the research conducted, it has been found that the partnership conditions have involved several sectors, especially community participation. Synergistic partnerships combine financial and non-financial resources from various parties for the best results. Effective multi-stakeholder partnerships involve implementing systemic change, institutional transformation, empowering stakeholder groups, handling conflict constructively, effective communication, leadership collaboration, and participatory learning. Conclusion: Partnership conditions involve diverse sectors, especially community participation, in an effort to combine resources for optimal results. Effective multi-stakeholder partnerships consider systemic change, institutional transformation, stakeholder empowerment, conflict management, communication, leadership collaboration, and participatory learning.

**Keywords:** Partnership, Multi-Stakeholder Partnership, Health System Strategy

## PENDAHULUAN

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang perlu dilakukan untuk pengembangan sebuah usaha agar mampu berdaya saing global (jahroh et al, 2019). Kemitraan merupakan bentuk kerjasama diantara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, dimana setiap pihak memiliki hak serta tanggungjawab yang telah saling disepakati bersama. Dalam bidang kesehatan, kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pembangunan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama bagi keseluruhan sektor. Kemitraan juga berperan dalam meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Kemitraan juga memberikan peluang sumber daya dari mitra potensial yang mana dalam pembangunan kesehatan juga dapat menjadi suatu modal dasar bagi keberhasilan program pembangunan sektor lain. (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Kemitraan dalam pelaksanaan sistem kesehatan telah menjadi bagian yang penting untuk dilakukan. Telah terdapat beragam inovasi penerapan berbagai kemitraan yang dijalini dalam sektor kesehatan di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Kusumawati, (2021), terdapat program kemitraan untuk memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang yaitu dengan menerapkan Good Governance. Kesepakatan prinsip pada penerapan good governance menjadi sebuah dasar agar pelaksanaan kemitraan dapat berjalan dengan baik sehingga kebutuhan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dipenuhi, seperti layanan kesehatan antara BPJS Kesehatan dan Faskes Swasta. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sriyanti et al., (2020), terdapat kemitraan yang dilakukan oleh Bidan Desa dan Dukun Bayi dengan memanfaatkan komunikasi untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Data peranan kemitraan di Indonesia masih sangat terbatas dan sulit untuk ditemukan, terutama kemitraan pada sektor kesehatan dengan lintas sektor lainnya. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya transparansi data dan keterbukaan informasi terkait kemitraan. Selain itu, perbedaan pemahaman antar pihak kemitraan yang masih kurang kemungkinan memberikan pengaruh terhadap kemampuan kolaborasi dan ketersediaan data yang akurat. Dalam kemitraan, faktor pendorong dalam kemitraan pada sektor kesehatan diantaranya yaitu keterbukaan informasi dan transparasi, terdapat upaya saling memahami (mutual understanding) dan saling menyesuaikan (mutual adjustment) serta terdapat komitmen kemitraan yang kuat dan mengikat (Pramesti & Kusumawati, 2021).

Dalam pelaksanaannya, kemitraan juga menyimpan berbagai tantangan besar karena membangun suatu kemitraan artinya saling berbagi control. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kemitraan lebih membutuhkan adanya pengaruh (influence) daripada kekuasaan (power) sehingga dibutuhkannya suatu strategi untuk memperkuat dan membangun kemitraan di bidang kesehatan. Kemitraan kemungkinan membutuhkan beroperasinya sistem atau suatu teknologi baru (Kementerian BAPPENAS, 2021).

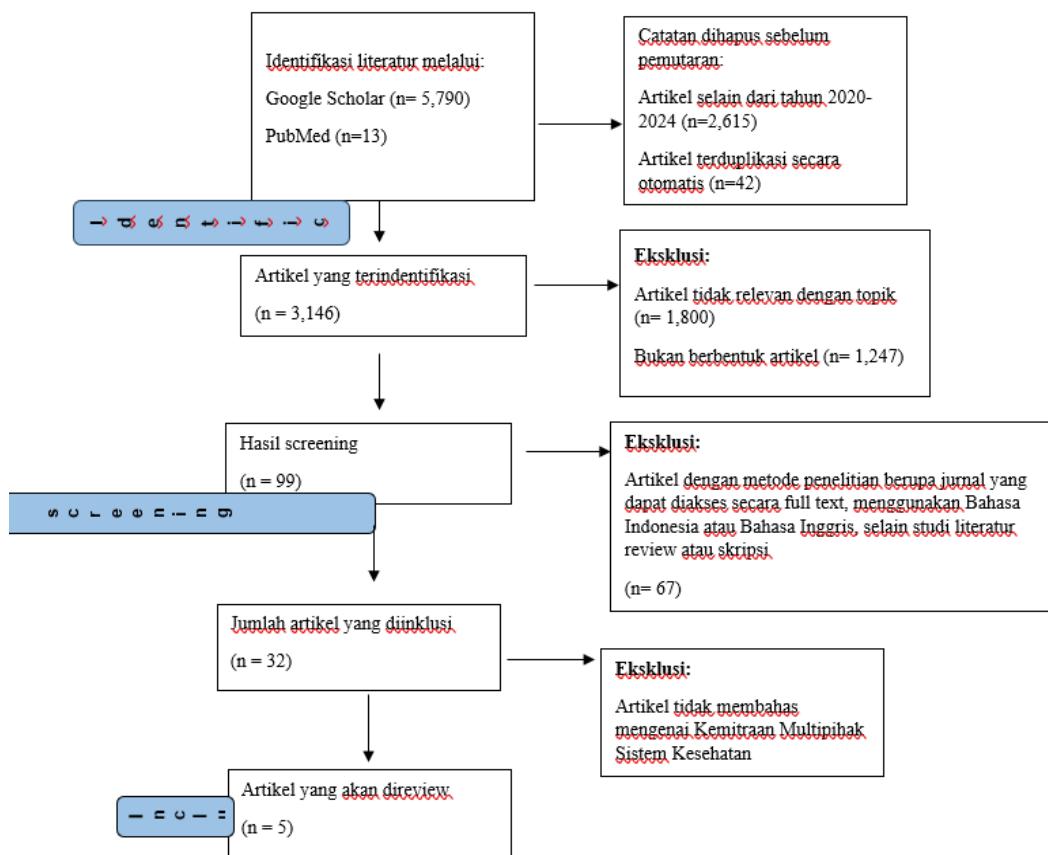
Salah satu strategi penguatan kemitraan di sektor kesehatan adalah kemitraan multipihak. Kemitraan pentahelix atau kemitraan multipihak sektor kesehatan dapat melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari unsur berbagai lintas sektor, seperti pemerintahan, perguruan tinggi/organisasi profesi, dunia usaha/swasta, LSM/Ormas, pemuka/tokoh masyarakat, kalangan pers/media. Selain itu, kemitraan multipihak juga dapat

melibatkan organisasi internasional, seperti WHO, UNICEF, GAVI, dan lain sebagainya (Bappenas, 2019).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review atau tinjauan pustaka. Data dalam artikel didapat yaitu melalui database seperti Google Scholar dan Pubmed. Dengan kata kunci “Jalinan Kemitraan” OR “Kemitraan Multipihak” OR “Strategi Sistem Kesehatan”. Kata kunci dengan bahasa Inggris menggunakan: “Partnership”, “Multi-Stakeholder Partnership”, “Health System Strategy”

Literatur ini ditinjau melalui kriteria inklusi dan ekslusi. Pada kriteria inklusi, artikel yang digunakan merupakan artikel yang dipublikasi dalam 5 tahun (2020-2024), yang membahas terkait kemitraan multipihak dalam sektor kesehatan, artikel tidak berbentuk literature review, serta artikel yang dapat diakses secara full text. Sedangkan pada kriteria ekslusi yaitu penelitian yang keluar dari pembahasan terkait kemitraan multipihak dalam sektor kesehatan.



Bagan 1. Strategi Pencarian Artikel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil *Literature Review*

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Amin et al., 2022	Model Proses Penanganan COVID-19 Dalam Perspektif Multi-Stakeholder Partnership	mengeksporasi model proses pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru melalui perspektif MSP.	Menggunakan metode kualitatif dengan analisis eksploratif.	MSP tertuang dalam struktur formal yaitu terbentuknya satuan tugas penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru yang terdiri dari multistakeholder dan terbagi dalam beberapa bidang kerja dan turunannya.
2.	Rina et al., 2020	Jalinan Kemitraan Posyandu dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Untuk dapat mengetahui pembedayaan masyarakat yang akan berkaitan dengan cara membangun kemitraan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan beberapa pihak	Menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan dengan pengumpulan data observasi, wawancara.	Bentuk kemitraan yang terlaksana pada posyandu Ledeng Kota Bandung dilihat masih belum terjalin dengan bagus karena masih kurangnya komunikasi dari pihak posyandu maupun dari masyarakat itu sendiri
3.	Muhammad Fariz Nugroho, Nurmasari Situmeang, Sindy Yulia Putri (2023)	Implementasi Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) Sebagai Upaya Penurunan Tingkat Prevalensi Stunting di Indonesia	Untuk menjelaskan upaya penurunan prevalensi stunting, khususnya di Indonesia melalui Scaling Up Nutrition Movement (Gerakan SUN)	Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara	kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam SUN Movement di Indonesia telah terbukti efektif, karena visi dan misi gerakan ini telah diadopsi secara luas. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berhasil mengurangi tingkat stunting.
4.	Ekaterina Loban, Catherine Scott, Virginia	Improving primary health care through partnerships: Key insights from a	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman	Studi longitudinal ini melibatkan tinjauan dokumen, observasi non-partisipan	Sinergi kemitraan terwujud dalam hal-hal berikut ini: (a) integrasi sumber daya, (b) suasana kemitraan,

Lewis, Susan Law, Jeannie Haggerty (2021)	cross-case analysis of multi-stakeholder partnerships in two Canadian provinces	mendalam tentang efektivitas kemitraan multi-kemangku pemangku pemangku kepentingan dalam menangani masalah-masalah yang kompleks di puskesmas.	terhadap pertemuan kemitraan, dan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan sampel pemangku kepentingan dalam dua kemitraan.	(c) manfaat yang dirasakan pemangku kepentingan, dan (d) kapasitas untuk beradaptasi dengan konteks. Sinergi dikembangkan sebelum hasil akses ke Puskesmas yang diharapkan dapat dinilai dan berperan sebagai indikator dinamis kesehatan kemitraan dan sumber energi yang mendorong peningkatan dan vitalitas kemitraan.
5. Kusroh Lailiyah (2023)	Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Percepatan Penurunan Stunting	Untuk mengetahui peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia dan upaya yang dilakukan dalam hal tersebut.	Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif	ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara efisien, serasi, dan terpadu dengan melibatkan berbagai sektor baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil literature review ini membahas mengenai kemitraan multipihak serta strategi untuk membangun kemitraan tersebut antara lain sebagai berikut.

## PEMBAHASAN

### Kondisi Jalinan Kemitraan Kesehatan di Indonesia

Kemitraan merupakan upaya yang dapat melibatkan beberapa komponen yang dimana dapat dimulai dari masyarakat, lembaga pemerintah sampai lembaga non-pemerintah. Indikasi keberhasilan dalam kemitraan dapat dinilai berdasarkan partisipasi aktif dari pihak yang terlibat. Kemitraan juga memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat yang dapat menumbuhkan minat dalam pengembangan organisasi (Rina et al., 2020).

Contohnya pada penelitian yang dilakukan terdapat bentuk kemitraan yang terjalin pada sektor kesehatan antara masyarakat dengan Posyandu RT 004 Ledeng, Kota Bandung. Bentuk kemitraan dalam pelaksanaan Posyandu yaitu dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah kesehatan lokal dan kemampuan pemecahan masalah kesehatan dan lebih mandiri dalam pencegahan dan pengenalan gejala penyakit. (Rina et al., 2020).

Adapun dalam suatu studi menyatakan, pada masa pandemi keresahan akibat kemunculan virus baru menjadi suatu tantangan sektor kesehatan di Indonesia. Dalam menanggulangi permasalahan ini, lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, komunitas, serta organisasi masyarakat juga turut membentuk suatu kemitraan untuk penanggulangan kasus COVID-19. Kemitraan multipihak dalam penanggulangan COVID-19 didasari oleh koordinasi yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat. Tim satgas khusus COVID dibentuk oleh tiap lembaga atau organisasi untuk merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tiap wilayah. Pakar kesehatan dan tokoh masyarakat juga turut andil peran dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah lokal dan Dinas Kesehatan. Tokoh adat seperti lurah atau kepala suku juga ikut berkontribusi dengan membangun kepercayaan masyarakat akan keamanan dan hal yang harus dilakukan untuk pencegahan penularan COVID-19. (Amin et al., 2022).

#### **Jenis-jenis kemitraan yang efektif untuk memperkuat sistem kesehatan**

Dalam layanan kesehatan primer, kemitraan multipihak pemangku kepentingan antara dokter, pembuat kebijakan, perwakilan akademis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemberian layanan menjadi semakin umum dilakukan. Kemitraan multipihak menawarkan keuntungan strategis untuk mengatasi masalah dalam konteks kesehatan masyarakat yang kompleks, cepat, dan berkembang pesat. Kemitraan yang sinergis memobilisasi sumber daya keuangan dan non-keuangan yang saling melengkapi dari berbagai pihak, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai melalui upaya-upaya individual (Loban, Scott, Lewis, Law, et al., 2021).

Beberapa contoh kemitraan multipihak yang relevan dengan SDGs, yang melibatkan Indonesia sebagai anggota aktif, antara lain 1) *Global Water Partnership* dalam kemitraan pengetahuan; 2) *The Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) dalam kemitraan standardisasi; 3) *The Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO); (4) *Open Government Partnership* (OGP) dalam kemitraan pelaksanaan. (Bappenas, 2018).

#### **Strategi untuk Membangun Kemitraan Kesehatan di Indonesia**

Dalam membangun dan memperkuat kemitraan multipihak kesehatan di Indonesia dibutuhkan strategi yang terorganisir dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan kesehatan terbesar yaitu stunting telah jelas menjadi fokus utama penyelesaian negara. Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) telah dijalankan Indonesia sebagai bentuk penanggulangan stunting. Pelaksanaan Gernas PPG melibatkan berbagai macam aktor publik dan sektor privat yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 42

Tahun 2013. Aktor-aktor ini terdiri dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, akademisi, media massa, dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan internasional (Nugroho et al., 2023). Sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berperan penting dalam mengoordinasikan segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting. Beberapa contoh bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menggandeng 13.734 konsultan KB dan 1 juta kader di seluruh Indonesia untuk mendampingi keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan. Selain itu, terdapat juga program yang mengharuskan calon pasangan suami istri memberikan informasi mengenai status gizi dan kesiapan kehamilan yang dikirimkan setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pernikahan. Program tersebut telah diluncurkan dengan bantuan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Kementerian Agama (Lailiyah, 2023).

Berdasarkan Brouwer et al., (2019), terdapat tujuh prinsip yang dapat dilaksanakan untuk membangun kemitraan multipihak lebih efektif, yaitu:

1. Menerapkan perubahan sistemik, dengan menilai kerumitan suatu situasi kesehatan, menganalisis situasi dari perspektif sistem, dan membentuk manajemen pengelolaan yang adaptif untuk membentuk suatu perubahan. Kemitraan multipihak biasanya muncul karena adanya permasalahan yang sulit, kompleks, atau sistemik yang tidak dapat diatasi oleh suatu organisasi secara mandiri. Masalah kesehatan merupakan masalah sistemik karena berpotensi berdampak pada semua aspek dalam sistem sosial. Sehingga diperlukan analisis terkait situasi untuk membangun kemitraan multipihak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Mentransformasikan institusi, artinya saat dibutuhkan atau kondisi kritis, perubahan kecil dalam suatu institusi termasuk ‘aturan’ dapat memberikan dampak yang sangat besar sehingga diperlukan sistem adaptif yang kompleks.
3. Pemberdayaan kelompok pemangku kepentingan tertentu yang menjadi bagian dalam kemitraan multipihak sehingga mereka dapat berkontribusi secara setara dengan yang lain.
4. Tidak mengabaikan atau mengesampingkan konflik yang terjadi, melainkan perlu untuk ditangani secara konstruktif.
5. Pengembangan komunikasi yang efektif karena kemitraan multipihak membutuhkan komunikasi untuk memahami perspektif antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan.
6. Pendekatan kolaborasi kepemimpinan antar pemangku kepentingan.

7. Mendorong pembelajaran partisipatif. Para pemangku kepentingan perlu untuk memahami tantangan kesehatan yang ada. Pembelajaran partisipatif terjadi ketika orang dewasa belajar dari pengalaman satu sama lain untuk memecahkan masalah suatu kesehatan yang muncul dan berinovasi dengan membentuk sistem kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

## KESIMPULAN

Dalam bidang kesehatan, kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pembangunan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama bagi keseluruhan sektor. Salah satu contoh bentuk program kemitraan untuk memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan menerapkan Good Governance yang mana dapat menjadi dasar agar pelaksanaan kemitraan dapat berjalan dengan baik sehingga kebutuhan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dipenuhi. Namun, data peranan kemitraan di Indonesia masih sangat terbatas dan sulit untuk ditemukan karena memungkinkan kurangnya transparasi data.

Salah satu strategi penguatan kemitraan di sektor kesehatan adalah kemitraan multipihak. Kemitraan pentahelix atau kemitraan multipihak sektor kesehatan dapat melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari unsur berbagai lintas sektor, seperti pemerintahan, perguruan tinggi/organisasi profesi, dunia usaha/swasta, LSM/Ormas, pemuka/tokoh masyarakat, kalangan pers/media. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berkeinginan dapat menghasilkan informasi mengenai ‘Strategi Membangun dan Memperkuat Kemitraan Multipihak untuk Memperkuat Sistem Kesehatan’ yang bermanfaat untuk kemajuan kesejahteraan kesehatan masyarakat Indonesia. Maka dari itu tim peneliti berkomitmen untuk menjalankan dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2019). *Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Panduan Menggalang Kemitraan di Bidang Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian BAPPENAS. (2021). *Panduan membangun kemitraan*. DAI Global LLC.
- Lailiyah, K. (2023). PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 16–33.
- Loban, E., Scott, C., Lewis, V., Law, S., & Haggerty, J. (2021). Improving primary health care through partnerships: Key insights from a cross-case analysis of multi-stakeholder partnerships in two Canadian provinces. *Health science reports*, 4(4), e397. <https://doi.org/10.1002/hsr2.397>

- Naralita, W., Stia Budi, I., & Safriantini, D. (2017). Peran Kemitraan Sektor Kesehatan dan Non Kesehatan dalam Perluasan Kepesertaan JKN di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 56–66. <https://doi.org/10.26553/jkm.2017.8.1.56-66>
- Nugroho, M. F., Situmeang, N., Putri, S. Y. (2023). Implementasi Gerakan Scalling Up Nutrition (SUN) Sebagai Upaya Penurunan Tingkat Prevalensi Stunting di Indonesia. *PIR Journal*, 7(2), 160–173.
- Pramesti, M. W., & Kusumawati, D. (2021). Good Governance Dalam Kemitraan Guna Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 67. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1967>
- Rina, B., Abdulhak, I., & Shantini, Y. (2020). Jalinan Kemitraan Program Posyandu dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Diklus: *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 112–123. <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i2.31620>
- Sriyanti, K., Husein, M. N., & Harmin, S. (2020). Komunikasi Bidan Desa Dalam Membangun Communication of Village Midwives in Building Partnerships With Traditional Birth Attendants Within Improving of Maternal and Child Health Degrees in South Konawe District. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 367–375.